PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN BAGI NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA (PERIODE 1 MEI SAMPAI 31 JULI 2024)

Fitri Amaliah¹, Niru Anita Sinaga²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : fitriamaliah2701@gmail.com¹, niruanitasinaga@unsurya.ac.id²

Citation: Fitri Amaliah., Niru Anita Sinaga. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas Iia Jakarta (Periode 1 Mei Sampai 31 Juli 2024). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.2024. 114-128

Submitted:11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

Abstrak

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan. Salah satu sistem pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Permasalahan mengenai pembinaan kepribadian yaitu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta bagaimana solusi terhadap pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi terhadap pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Narapidana di Lapas perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Mei Sampai 31 Juli 2024) yaitu menyelenggarakan kampanye sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Terakhir yaitu dengan merampingkan prosedur administrasi dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan mempercepat proses perizinan dan persetujuan serta mengimplementasikan sistem administrasi digital untuk mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat pengolahan data serta dokumen. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta terdapat dari petugas dan tenaga ahli di dalam lapas tersebut. Kemudian faktor dari narapidana, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana serta faktor administrasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, maka dilakukan dengan mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis pemasyarakatan dan administrasi, serta mengadakan program-program motivasi, seperti seminar, lokakarya, dan sesi konseling yang diarahkan untuk meningkatkan semangat dan motivasi narapidana.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembinaan Kemandirian, Narapidana

Abstract

The correctional system is organized for the purpose of improving the quality of personality and independence of inmates. One of the correctional systems is personality development carried out at the Class IIA Jakarta Women's Prison. The problem regarding personality development is an inhibiting factor in the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison. What is the solution to the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison? The purpose of this study was to determine the solution to the implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison. This research method uses normative research, namely research conducted by analyzing written laws from library materials or secondary data. The implementation of independence development for inmates at the Class IIA Jakarta Women's Prison (Period 1 May to 31 July 2024) is to organize a socialization campaign to educate the public about the importance of rehabilitation and reintegration of inmates. Finally, by streamlining administrative procedures by eliminating unnecessary steps and accelerating the licensing and approval process and implementing a digital administration system to reduce overlapping work and accelerate data and document processing. Inhibiting factors in the implementation of independence coaching for inmates at Class IIA Jakarta Women's Prison are from officers and experts in the prison. Then there are factors from inmates, community factors, facilities and infrastructure factors and administrative factors. To overcome these obstacles, it is done by sending officers to attend technical correctional and administrative training, and holding motivational programs, such as seminars, workshops, and counseling sessions aimed at increasing the spirit and motivation of inmates.

Keywords: Implementation, Development of Independence, Prisoners

A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dirancang untuk memfasilitasi perubahan positif pada narapidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan taat hukum setelah menjalani masa hukuman. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana. Namun, efektivitas sistem ini sering kali terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan.

Sejarah pembinaan narapidana di Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda dengan diterbitkannya *Gestichten Reglement* pada tahun 1917, yang awalnya berfokus pada pembalasan.¹ Baru pada tahun 1963, sistem pemasyarakatan diperkenalkan oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman saat itu, yang mengganti paradigma hukuman menjadi pembinaan dengan tujuan resosialisasi.² Saat ini, terdapat 457 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menampung lebih dari 154.000 narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia.³

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Secara umum, tindak kriminal lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki, sementara perempuan lebih sering dipandang sebagai korban. Namun, dengan adanya Lapas Perempuan, terlihat bahwa perempuan juga dapat menjadi pelaku tindak pidana.⁴ Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta memiliki peran strategis dalam membina narapidana wanita agar mereka dapat beradaptasi kembali setelah bebas. Program pembinaan di lapas ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan formal dan nonformal, serta pembinaan keagamaan dan spiritual.

Namun, dalam praktiknya, pembinaan sering kali menghadapi kendala, seperti keterbatasan fasilitas fisik, minimnya tenaga pendidik, dan program pembinaan yang kurang

¹ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007, p. 85.

² Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, p. 25.

³ Data diperoleh dari <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> pada hari Kamis, 12 Maret 2024. Data jumlah narapidana dan tahanan selalu diperbarui setiap hari melalui pesan singkat dari setiap UPT di seluruh Indonesia.

⁴ Wanda Fitri. "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus Residivis Perempuan." *Kafa'ah Journal* Vol. 7 No. 1, Juni-Juli 2017, p. 112-155.

terstruktur serta tidak menyesuaikan kebutuhan individu narapidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana, tenaga ahli, serta pendekatan yang lebih efektif dalam pelaksanaan program pembinaan.

Sistem pemasyarakatan yang diperkenalkan oleh Sahardjo pada 1963 secara resmi menggantikan konsep penjara dengan istilah "pemasyarakatan" pada 27 April 1964. Konsep ini menekankan bahwa narapidana bukan sekadar objek hukuman, melainkan individu yang perlu dipersiapkan agar dapat kembali ke masyarakat secara sehat dan produktif. Sistem ini diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yang membagi tahapan pembinaan narapidana menjadi empat, yaitu:⁵

- 1) Tahap Keamanan Maksimal (hingga 1/3 masa pidana), di mana narapidana masih berada dalam pengawasan ketat di dalam lapas.
- 2) Tahap Keamanan Menengah (hingga 1/2 masa pidana), di mana mereka mulai memperoleh kebebasan terbatas dalam lingkungan lapas.
- 3) Tahap Keamanan Minimal (hingga 2/3 masa pidana), saat narapidana menunjukkan perkembangan positif dan mulai disiapkan untuk berintegrasi dengan masyarakat.
- 4) Tahap Integrasi (2/3 masa pidana hingga selesai), yang memungkinkan mereka mengikuti program asimilasi atau pembebasan bersyarat.

Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM memiliki dua jenis pembinaan utama:

- 1) Pembinaan Kemandirian, yang membekali narapidana dengan keterampilan agar mereka dapat hidup mandiri setelah bebas, seperti budidaya sayuran dan ikan lele, tata boga, menjahit, serta kegiatan olahraga.
- 2) Pembinaan Kepribadian, yang bertujuan membangun karakter dan kesadaran hukum melalui kegiatan keagamaan, shalat berjamaah, tadarus, pengajian, serta upacara nasional.

Proses asimilasi ini bertujuan meningkatkan rasa percaya diri narapidana agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yang menegaskan pentingnya pembinaan narapidana agar mereka dapat berkontribusi sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

⁵ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Mei Sampai 31 Juli 2024)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta menerapkan pola pembinaan bertahap yang meliputi tiga tahap utama: Tahap Awal, Tahap Lanjutan, dan Tahap Akhir.

Pada tahap awal, proses dimulai dengan penerimaan warga binaan baru yang dilakukan dengan pengamatan dan penelitian lingkungan, dilanjutkan dengan pembinaan kepribadian, kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran hukum. Pembinaan ini berlangsung hingga satu per tiga masa pidana dengan pengamanan *maximum security*.

Tahap lanjutan berfokus pada pengembangan keterampilan dan asimilasi, yang berlangsung dari setengah hingga dua per tiga masa pidana. Pembinaan lanjutan mencakup keterampilan mandiri, usaha industri kecil, dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat

warga binaan, serta asimilasi berupa kegiatan di luar lapas seperti melanjutkan pendidikan, bekerja, atau beribadah. Tahap ini diterapkan dengan pengamanan *open camp*.

Tahap akhir bertujuan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan pembinaan yang lebih difokuskan pada penguatan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran hukum, serta keterampilan yang mendukung kemandirian. Pembinaan kemandirian ini melibatkan keterampilan untuk usaha mandiri, industri kecil, dan pertanian menggunakan teknologi. Seluruh tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta bertujuan untuk membekali warga binaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang memungkinkan mereka untuk kembali hidup sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Rekapitulasi Pelatihan Keterampilan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta Periode
Mei-Juli 2024

No	Jenis Pelatihan	Pihak Ketiga	Jumlah Peserta	Tanggal Pelatihan
1	Pelatihan Tata Busana	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur	10	30 April 2024 s/d 6 Juni 2024
2	Pelatihan Tata Boga	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur	10	30 April 2024 s/d 6 Juni 2024
3	Pelatihan Desain Grafis	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara	10	13 Mei 2024 s/d 12 Juni 2024
4	Pelatihan Tata Boga	Yayasan Rumah Berbagi	10	12 Juni 2024

Sumber : Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, sistem pemasyarakatan terdiri dari dua bagian utama, yakni pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembinaan di luar Lapas.⁶ Pembinaan di dalam Lapas tidak hanya terbatas pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam lembaga itu sendiri, tetapi juga mencakup pembinaan yang dilaksanakan di luar lapas, seperti pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Meskipun demikian, pembinaan tersebut tetap dianggap bagian dari proses pemasyarakatan, selama belum mencapai tahap integrasi penuh ke masyarakat. Sementara itu, pembinaan di luar Lapas lebih berfokus pada integrasi warga binaan ke dalam masyarakat melalui pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dengan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

⁶ Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*. Bandung: Armico, 1994, p. 21-24.

berperan dalam memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan selama proses integrasi ini berlangsung.

Pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04-01 tahun 1990, yang mencakup beberapa bentuk kegiatan. Pertama, penyuluhan rohani, yang berupa ceramah, pendidikan agama, dan penyuluhan keagamaan yang dilaksanakan dengan kerjasama instansi pemerintah, dengan pengawasan ketat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kedua, penyuluhan jasmani, yang melibatkan kegiatan olahraga, kesenian, dan rekreasi di dalam Lapas, seperti senam pagi, pertandingan olahraga, dan kegiatan seni, yang semuanya diawasi oleh petugas untuk menjaga keamanan. Ketiga, bimbingan bakat dan keterampilan, di mana warga binaan diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki, seperti melukis atau mengukir, yang diharapkan dapat berguna setelah mereka kembali ke masyarakat. Terakhir, perpustakaan disediakan sebagai sarana untuk mengisi waktu luang dan memperkaya pengetahuan warga binaan, dengan koleksi buku-buku agama, pengetahuan umum, dan kejuruan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kedua sub-sistem ini pembinaan di dalam dan di luar Lapas merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana yang lebih luas.⁷ Pembaharuan dalam sistem hukum pidana materiil harus diikuti dengan pembaharuan dalam sistem hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana. Penjatuhan pidana bukan hanya kewenangan hakim dalam arti sempit, tetapi juga melibatkan seluruh rangkaian tindakan hukum, dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pidana, yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum. Dengan demikian, pembinaan dalam pemasyarakatan merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menegakkan hukum dan memastikan reintegrasi sosial bagi narapidana.⁸

Tabel Rencana / Program Kegiatan Pembinaan Warga Binaan

NO	HARI	PEMBINAAN	BAIK	CUKUP	KURANG
1	SENIN	Admisi dan Orientasi		✓	
2	SELASA	Pembinaan Kepribadian			✓
3	RABU	Pembinaan Kepribadian Lanjutan			✓
4	KAMIS	Pembinaan Kemandirian			✓

⁷ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2007, p. 1-2.

⁸ *Ibid*, p.11

5	JUMAT	Keterampilan Usaha Mandiri		✓	
6	SABTU	Keterampilan Usaha Industri Kecil	✓		
7	MINGGU	Keterampilan Industri Pertanian/Perikanan	✓		

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta masih belum sepenuhnya efektif. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk memberikan keterampilan yang berguna bagi warga binaan agar mereka dapat hidup mandiri setelah keluar dari Lapas dan kembali ke masyarakat. Harapannya, setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka dapat menggunakan bekal pembinaan yang diperoleh selama di Lapas dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak mengulangi tindakan kriminal. Warga binaan diharapkan dapat menjadi individu yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.

Namun, untuk memastikan keberhasilan sistem pemasyarakatan ini, diperlukan peran serta masyarakat yang tidak hanya dalam bentuk kerjasama pembinaan, tetapi juga kesediaan untuk menerima kembali warga binaan yang telah selesai menjalani hukuman. Petugas pemasyarakatan juga memegang peranan penting dengan dedikasi dan kemampuan yang baik untuk membimbing warga binaan. Untuk itu, penting bagi petugas pemasyarakatan untuk terus meningkatkan wawasan pengetahuan, pendidikan, dan komitmen dalam menjalankan tugas mereka.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini juga melibatkan lembaga lain, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang memberikan saran kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberikan masukan mengenai program pembinaan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT). Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga binaan, termasuk dalam bidang kesehatan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk mendukung pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan ketahanan bangsa, dan mendukung pembangunan nasional.

Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang demi menjamin pengakuan terhadap hak orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembinaan warga binaan telah berkembang menjadi suatu pendekatan yang lebih luas,

yaitu tidak hanya sekedar rehabilitasi, namun juga pembentukan standar minimum dalam pembinaan narapidana. Standar ini meliputi fasilitas yang baik, kapasitas penampungan yang cukup, serta pedoman pembinaan yang jelas dan terstruktur.⁹

Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan narapidana hidup mandiri setelah menjalani hukuman. Namun, tantangan terbesar adalah stigma yang sering melekat pada narapidana, yang dapat menyulitkan mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha setelah bebas. Meskipun demikian, pembinaan kemandirian memberikan manfaat besar dalam meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan mengurangi tingkat residivisme. Oleh karena itu, dengan peningkatan kerjasama antara lembaga terkait dan pengembangan program yang berkelanjutan, diharapkan pembinaan kemandirian dapat dilaksanakan lebih efektif, sehingga narapidana dapat reintegrasi dengan masyarakat secara positif.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Dalam perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia, pembinaan terhadap narapidana tidak hanya bertujuan untuk hukuman, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan membawa bekal yang dapat membantu mereka beradaptasi. Dalam konteks ini, ada dua jenis pembinaan utama: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian lebih difokuskan pada pembentukan mental dan watak narapidana agar mereka tidak hanya menyadari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga memiliki komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Pembinaan ini mencakup beberapa aspek, seperti kesadaran beragama, nasionalisme, kecerdasan/intelektual, dan kesadaran hukum. Tujuannya adalah untuk menjadikan narapidana sebagai individu yang lebih baik, bertanggung jawab, dan dapat berkontribusi positif kepada masyarakat setelah masa pidananya selesai.

Sementara itu, pembinaan kemandirian berfokus pada pemberian keterampilan praktis yang dibutuhkan narapidana untuk hidup mandiri setelah bebas. Ini mencakup pelatihan keterampilan yang bisa mendukung mereka mencari pekerjaan dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pembinaan kemandirian ini sangat penting, terutama bagi

⁹ Widiada Gunakaya. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 2001, p. 94.

narapidana perempuan yang sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam beradaptasi dengan masyarakat setelah mereka dibebaskan.

Namun, ada banyak tantangan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini, seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembinaan yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pembinaan tersebut benar-benar terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan individual narapidana. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dari petugas pemasyarakatan untuk terus memotivasi dan memberikan dukungan kepada narapidana agar proses resosialisasi berjalan dengan baik.

Selain itu, perlindungan hukum bagi warga binaan sangat penting agar hak-hak mereka dihormati selama menjalani masa pidana. Ini termasuk perlakuan yang adil, akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat membantu mereka memperbaiki diri. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan para narapidana, baik pria maupun wanita, dapat bertransformasi menjadi individu yang tidak hanya bebas dari hukuman, tetapi juga siap berperan kembali dalam pembangunan masyarakat.

Penerapan pembinaan kemandirian ini, terutama bagi narapidana wanita, harus memprioritaskan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sosial mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan yang terfokus dan berbasis kebutuhan individu akan lebih efektif dalam membantu narapidana kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih positif.

Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua pola utama: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan narapidana dalam menghadapi masalah, baik selama di Lapas maupun setelah bebas. Sedangkan pembinaan kemandirian difokuskan pada pelatihan keterampilan yang berguna bagi narapidana agar mereka dapat mandiri setelah keluar dari Lapas.

Namun, dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas program pembinaan tersebut. Hambatan ini berasal dari beberapa faktor, antara lain:¹⁰

- 1) Hambatan dari Petugas dan Tenaga Ahli: Terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang tertentu, seperti psikolog, sosiolog, dan pengajar keterampilan, serta kurangnya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Agustina sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Tanggal 10 Juli 2024 Pukul : 14:30 Wib.

semangat dan kesejahteraan petugas, dapat menghambat pelaksanaan pembinaan. Beberapa langkah yang diambil adalah mendatangkan tenaga ahli dari luar dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia.

- 2) Hambatan dari Narapidana: Banyak narapidana yang belum sepenuhnya menyadari tujuan pembinaan, dan ada juga yang melawan proses tersebut. Hambatan lainnya adalah meningkatnya jumlah narapidana yang menyebabkan pembinaan menjadi kurang efektif.
- 3) Hambatan dari Masyarakat: Stereotip masyarakat terhadap narapidana, yang sering kali dianggap tetap berbahaya meskipun telah menjalani pembinaan, menghambat reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Kurangnya partisipasi keluarga dan masyarakat juga menambah tantangan ini.
- 4) Hambatan Sarana dan Prasarana: Keterbatasan fasilitas fisik dan non-fisik, seperti ruang pelatihan yang terbatas dan kurangnya perlengkapan yang mendukung pembinaan, memperlambat program. Beberapa upaya yang dilakukan adalah perbaikan fasilitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan Lapas.
- 5) Hambatan Administrasi: Prosedur administrasi yang rumit dapat menghambat kelancaran program pembinaan, misalnya dalam hal pembebasan bersyarat. Penyederhanaan prosedur ini menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pembinaan.

Overkapasitas di Lapas juga menjadi masalah besar, karena banyaknya narapidana yang melebihi kapasitas optimal menghambat jalannya pembinaan. Hal ini mengurangi efektivitas pelatihan keterampilan, karena tidak semua narapidana dapat mengaksesnya secara optimal. Selain itu, ruang pelatihan yang terbatas membuat banyak narapidana tidak dapat mengikuti program ini.

Meskipun demikian, tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah bukan pembalasan, melainkan untuk resosialisasi atau pemulihan sosial. Narapidana dipisahkan sementara dari masyarakat untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan norma-norma sosial setelah bebas. Agar tujuan ini tercapai, semua pihak, mulai dari petugas, narapidana, masyarakat, hingga sarana dan prasarana, harus bekerja sama secara efektif.

Adapun Solusi yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan terhadap Pembinaan Kemandirian wargabinaan Wanita yaitu sebagai berikut :¹¹

1) Solusi dari Petugas dan Tenaga Ahli

Untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, diperlukan penguatan kapasitas petugas dan tenaga ahli. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis pemyarakatan dan administrasi. Diklat ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan petugas mengenai teknik-teknik terbaru dalam pembinaan dan administrasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien dan profesional. Selain itu, mengadakan briefing secara periodik juga penting untuk memastikan bahwa seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prosedur pembinaan. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan, sehingga proses pembinaan bisa berjalan lebih efektif.

2) Solusi dari Hambatan Narapidana

Dalam mengatasi hambatan yang terkait dengan motivasi narapidana perempuan, perlu diadakan program-program motivasi yang dapat meningkatkan semangat mereka untuk mengikuti pembinaan. Program seperti seminar, lokakarya, dan sesi konseling menjadi sangat penting dalam memberikan dukungan mental dan emosional kepada narapidana. Melalui seminar dan lokakarya, mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya bermanfaat selama masa hukuman, tetapi juga ketika mereka kembali ke masyarakat. Sesi konseling dapat membantu narapidana untuk lebih memahami diri mereka dan mengatasi masalah-masalah pribadi yang mungkin menghambat proses pembinaan. Dengan adanya program-program motivasi ini, diharapkan narapidana perempuan dapat lebih termotivasi untuk bertransformasi menjadi individu yang lebih baik.

3) Solusi dari Hambatan Masyarakat

Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap narapidana yang baru saja keluar dari Lapas, yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Kampanye ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, seminar, dan diskusi publik yang menekankan bahwa narapidana yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik memiliki potensi untuk berkontribusi positif

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Agustina sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Tanggal 10 Juli 2024 Pukul : 15:00 Wib.

dalam masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengubah stigma sosial yang ada dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi narapidana yang hendak reintegrasi ke masyarakat setelah masa hukuman mereka selesai.

4) Solusi dari Hambatan Sarana dan Prasarana

Hambatan terkait sarana dan prasarana sering kali menjadi tantangan besar dalam pembinaan kemandirian di Lapas. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang ada guna memastikan bahwa fasilitas yang digunakan dalam program pembinaan berada dalam kondisi yang baik dan aman. Selain itu, pemerintah juga perlu mengajukan anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru yang dapat mendukung program-program pembinaan kemandirian, seperti ruang kelas untuk pelatihan keterampilan, workshop, serta fasilitas olahraga. Dengan fasilitas yang memadai, narapidana perempuan akan memiliki akses yang lebih baik terhadap program pembinaan yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan setelah mereka dibebaskan.

5) Solusi dari Hambatan Administrasi

Dalam pembinaan kemandirian, hambatan administrasi sering kali memperlambat proses yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya untuk merampingkan prosedur administrasi dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan mempercepat proses perizinan serta persetujuan yang diperlukan dalam program pembinaan. Salah satu cara untuk mempercepat proses administrasi adalah dengan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang dapat mempermudah pengolahan data dan dokumen secara efisien. Dengan sistem digital, tumpang tindih pekerjaan dapat diminimalisir, dan akses terhadap data menjadi lebih cepat dan transparan. Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan hambatan administrasi dalam pembinaan kemandirian di Lapas perempuan dapat diminimalisir, sehingga program-program pembinaan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi narapidana.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Narapidana di Lapas perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Mei Sampai 31 Juli 2024) dengan cara mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis pemyasyarakatan dan administrasi, serta mengadakan program-program motivasi, seperti seminar, lokakarya, dan sesi konseling yang diarahkan untuk meningkatkan semangat dan motivasi narapidana. Pembinaan kemandirian meliputi keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil,

keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya / tinggi.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta berupa faktor hambatan dari petugas dan tenaga ahli, faktor penghambat dari narapidana, faktor penghambat dari masyarakat, faktor penghambat dari sarana dan prasarana serta faktor penghambat dari administrasi periode 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Solusi berikutnya adalah Menyelenggarakan kampanye sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur yang ada untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Solusi terakhir yaitu dengan merampingkan prosedur administrasi dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan mempercepat proses perizinan dan persetujuan serta mengimplementasikan sistem administrasi digital untuk mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat pengolahan data serta dokumen.

E. SARAN

Agar pelaksanaan perlakuan kepada setiap narapidana itu dilakukan sebagai mana mestinya sesuai dengan amanat Undang-Undang dan setiap kekurangan dari segi apapun supaya tidak menjadikan halangan itu sebagai jalan untuk melakukan hal-hal yang tidak diatur oleh aturan yang ada. Dalam pembinaan Warga Binaan secara baik hendaknya para praktisi hukum atau penegak keadilan dalam hal ini petugas, pembina dan para pimpinan lembaga pemasyarakatan.

Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta untuk lebih mengintensifkan kepribadian warga binaan serta pola pikir terhadap warga binaan yang tidak mengikuti kegiatan dengan baik agar mereka menyadari pentingnya pembinaan dan lebih meningkatkan program pelatihan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita sehingga warga binaan tidak merasa bosan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2007.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Buku Ketiga), Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), 2007.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Bandung: Armico, 1994.

Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung: Armico, 2001.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Ardilla, Fauziya dan Ike Herdiana, "Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita", *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol.2, No.01, Februari 2019.

Fitri, Wanda, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus Residivis Perempuan", *Kafa'ah Journal*, Vol. 7, No.1, Juni-Juli 2017.

Mawardi, Ahmad, "Asimilasi serta Integrasi pada Narapidana Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Telaah Fiqh Siyasah", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2022.

Megawati dan Kurniawan, "Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi", *Serambi Akademia: Jurnal Pendidikan, Sains* Vol. 7 No. 3, Desember 2019.

Mirawati, "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan", *Jurnal Al-Dustur* Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

Wanda Fitri, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial pada Kasus Residivis Perempuan", *Kafa'ah Journal* Vol. 7 No. 1, Juni-Juli 2017.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Tahun 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan